



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan perubahan mendahului terhadap Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 adalah dalam rangka mendorong pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional/daerah dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

10/1/20

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 46);

MFT

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 655);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 63);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

- (1) Peraturan Bupati yang dimaksud adalah Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2019;

Handwritten signature

- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal (1) meliputi penyesuaian terhadap data tranfer dari PEPRES No. 54 Tahun 2020 dan PMK No. 35 tahun 2020 dengan PEPRES No. 72 Tahun 2020 dimana pada PEPRES No. 72 Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Makuku Tengah mendapatkan tambahan DAK Fisik sebesar Rp 13.337.511.000,- (tigabelas milyar tigaratus tigapuluh tujuh juta limaratus sebelas ribu rupiah);
- (3) DAK Fisik sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
 - a. DAK Penugasan sebesar Rp. 9.730.882.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tigapuluh juta delapan ratus delapan puluh dua rupiah) untuk Bidang Kesehatan dan KB.
 - b. DAK Afiriasi sebesar Rp. 3.606.629.000,- (tiga milyar enam ratus enam juta enam ratus duapuluh sembilan ribu rupiah) untuk Bidang Tranportasi Pedesaan.

Pasal 2

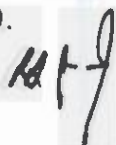
Penyesuaian terhadap rincian tambahan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) pada APBD dilakukan mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku tengah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

- (1) Realisasi Anggaran dapat dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) ditandai dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Anggaran kegiatan DAK Fisik pada Pasal 2 yang akan direalisasikan mendahului Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini menjadi satu kesatuan dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 27 Juni 2020

BUPATI MALUKU TENGAH,


FASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal, 27 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH,


RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2020 NOMOR 473

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 20 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JUNI 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPAIK DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA OPD	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PENJELASAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. 03. 1. 03. 01. 01. 18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	400,000,000	290,000,000	(110,000,000)	
	1. 03. 1. 03. 01. 01. 18. 5.2. 2. 15. 02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	400,000,000	290,000,000	(110,000,000)	
	1. 03. 1. 03. 01. 02. 03.	Pembangunan Gedung Kantor	14,161,720,000	13,768,520,000	(393,200,000)	
	1. 03. 1. 03. 01. 02. 03. 5.2. 3. 49. 01.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	14,161,720,000	13,768,520,000	(393,200,000)	
	1. 03. 1. 03. 01. 02. 05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	508,820,000	342,000,000	(166,820,000)	
	1. 03. 1. 03. 01. 02. 05. 5.2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,970,000	-	(2,970,000)	
	1. 03. 1. 03. 01. 02. 05. 5.2. 1. 01. 02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600,000	-	(600,000)	
	1. 03. 1. 03. 01. 02. 05. 5.2. 2. 01. 02.	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	250,000	-	(250,000)	
	1. 03. 1. 03. 01. 02. 05. 5.2. 3. 17. 01.	Belanja Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	505,000,000	342,000,000	(163,000,000)	
	1. 03. 1. 03. 01. 02. 09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	276,330,000	341,330,000	65,000,000	
	1. 03. 1. 03. 01. 02. 09. 5.2. 3. 29. 02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	276,330,000	341,330,000	65,000,000	
	1. 03. 1. 03. 01. 02. 42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	3,055,960,000	3,685,040,000	629,080,000	
	1. 03. 1. 03. 01. 02. 42. 5.2. 3. 49. 01.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	3,055,960,000	3,685,040,000	629,080,000	
	1. 03. 1. 03. 01. 07. 01.	Peningkatan Jalan	12,004,214,000	12,356,200,000	351,986,000	
	1. 03. 1. 03. 01. 07. 01. 5.2. 3. 59. 03.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	12,004,214,000	12,356,200,000	351,986,000	
	1. 03. 1. 03. 01. 15. 05.	Pembangunan Jembatan	9,099,416,000	6,703,428,500	(2,395,987,500)	
	1. 03. 1. 03. 01. 15. 05. 5.2. 3. 60. 03.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	9,099,416,000	6,703,428,500	(2,395,987,500)	
	1. 03. 1. 03. 01. 15. 12.	Pembangunan Jalan (DAK Afirmasi)	3,499,410,000	3,606,128,800	106,718,800	
	1. 03. 1. 03. 01. 15. 12. 5.2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39,760,000	42,000,000	2,240,000	
	1. 03. 1. 03. 01. 15. 12. 5.2. 1. 01. 02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8,560,000	6,420,000	(2,140,000)	
1. 03. 1. 03. 01. 15. 12. 5.2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1,450,000	3,593,000	2,143,000		
1. 03. 1. 03. 01. 15. 12. 5.2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47,450,000	144,925,800	97,475,800		
1. 03. 1. 03. 01. 15. 12. 5.2. 2. 21. 03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	27,000,000	27,000,000		
1. 03. 1. 03. 01. 15. 12. 5.2. 3. 59. 03.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	3,402,190,000	3,382,190,000	(20,000,000)		

Handwritten signature

NAMA OPD	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PENJELASAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
	1. 03. 1. 03. 01. 15. 17.	Pengawasan Jalan dan Jembatan	466,260,000	463,000,000	(3,260,000)	
	1. 03. 1. 03. 01. 15. 17. 5.2. 1. 21. 03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	466,260,000	463,000,000	(3,260,000)	
	1. 03. 1. 03. 01. 16. 03.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	4,362,864,000	2,994,612,475	(1,368,251,525)	
	1. 03. 1. 03. 01. 16. 03. 5.2. 3. 63. 05.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	4,362,864,000	2,994,612,475	(1,368,251,525)	
	1. 03. 1. 03. 01. 18. 09.	Pemeliharaan Rutin Jalan	1,030,285,000	931,270,000	(99,015,000)	
	1. 03. 1. 03. 01. 18. 09. 5.2. 1. 02. 02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	340,300,000	322,450,000	(17,850,000)	
	1. 03. 1. 03. 01. 18. 09. 5.2. 2. 01. 05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	182,815,000	200,084,500	17,269,500	
	1. 03. 1. 03. 01. 18. 09. 5.2. 2. 01. 06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	273,003,000	276,735,500	3,732,500	
	1. 03. 1. 03. 01. 18. 09. 5.2. 2. 08. 01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	114,000,000	132,000,000	18,000,000	
	1. 03. 1. 03. 01. 18. 09. 5.2. 2. 20. 01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	120,167,000	-	(120,167,000)	
	1. 03. 1. 03. 01. 24. 18.	Pengawasan Irigasi	142,255,000	142,255,000	-	
	1. 03. 1. 03. 01. 24. 18. 5.2. 3. 61. 06.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	142,255,000	142,255,000	-	
	1. 03. 1. 03. 01. 24. 28.	Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK - Penugasan)	226,254,000	226,254,000	-	
	1. 03. 1. 03. 01. 24. 28. 5.2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53,550,000	53,300,000	(250,000)	
	1. 03. 1. 03. 01. 24. 28. 5.2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	760,000	1,674,000	914,000	
	1. 03. 1. 03. 01. 24. 28. 5.2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70,620,000	148,580,000	77,960,000	
	1. 03. 1. 03. 01. 24. 28. 5.2. 2. 15. 02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	101,324,000	22,700,000	(78,624,000)	
	1. 03. 1. 03. 01. 28. 06.	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai	6,810,465,000	6,869,595,000	59,130,000	
	1. 03. 1. 03. 01. 28. 06. 5.2. 3. 64. 05.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai	6,810,465,000	6,869,595,000	59,130,000	
	1. 03. 1. 03. 01. 28. 09.	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	4,475,040,000	4,510,460,000	35,420,000	
	1. 03. 1. 03. 01. 28. 09. 5.2. 3. 62. 05.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	4,475,040,000	4,510,460,000	35,420,000	
	1. 03. 1. 03. 01. 28. 10.	Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak	2,267,200,000	983,600,000	(1,283,600,000)	
	1. 03. 1. 03. 01. 28. 10. 5.2. 3. 62. 05.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	2,267,200,000	983,600,000	(1,283,600,000)	
	1. 03. 1. 03. 01. 30. 02.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	13,105,205,000	10,334,385,000	(2,770,820,000)	
	1. 03. 1. 03. 01. 30. 02. 5.2. 3. 59. 04.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	13,105,205,000	10,334,385,000	(2,770,820,000)	
	1. 03. 1. 03. 01. 30. 03.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	8,047,620,000	9,163,575,000	1,115,955,000	
	1. 03. 1. 03. 01. 30. 03. 5.2. 3. 69. 02.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber/mata Air	8,047,620,000	9,163,575,000	1,115,955,000	

AK

NAMA OPD	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PENJELASAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. 03. 1. 03. 01. 30. 12.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK Penugasan)	3,990,000,000	1,089,500,000	(2,900,500,000)	
	1. 03. 1. 03. 01. 30. 12. 5. 2. 3. 69. 02.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber/mata Air	3,990,000,000	1,089,500,000	(2,900,500,000)	
	2. 05. 1. 03. 01. 24. 05.	Penataan RTH	10,252,980,000	7,357,030,000	(2,895,950,000)	
	2. 05. 1. 03. 01. 24. 05. 5. 2. 3. 59. 05.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	10,252,980,000	7,357,030,000	(2,895,950,000)	
	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	-	16,353,867,000	16,353,867,000	
	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	120,090,000	120,090,000	
	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 1. 01. 02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	17,710,000	17,710,000	
	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 1. 01. 04.	Honorarium tim Penerima Hasil Pekerjaan	-	11,100,000	11,100,000	
	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	-	5,033,000	5,033,000	
	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 01. 04.	Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya	-	180,000	180,000	
	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 03. 07.	Belanja Peket/Pengiriman	-	3,600,000	3,600,000	
	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 06. 01.	Belanja Cetak	-	17,696,000	17,696,000	
	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 06. 02.	Belanja Penggandaan	-	4,500,000	4,500,000	
	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	151,965,000	151,965,000	
	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 15. 02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	68,126,000	68,126,000	
	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 3. 59. 04.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	-	3,490,754,304	3,490,754,304	
	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 3. 62. 05.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	-	1,196,816,400	1,196,816,400	
	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 3. 64. 05.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	-	1,701,402,720	1,701,402,720	
	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 3. 67. 03.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	-	7,736,309,275	7,736,309,275	
	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 3. 69. 02.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber/Mata Air	-	1,828,584,301	1,828,584,301	
Dinas Perikanan	3. 03. 3. 03. 01. 20. 07.	Pengembangan Budidaya Air Tawar (DAK)	18,840,000	18,840,000	-	
	3. 03. 3. 03. 01. 20. 07. 5. 2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,980,000	6,480,000	(4,500,000)	
	3. 03. 3. 03. 01. 20. 07. 5. 2. 1. 01. 02.	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	-	480,000	480,000	
	3. 03. 3. 03. 01. 20. 07. 5. 2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	440,000	550,000	110,000	
	3. 03. 3. 03. 01. 20. 07. 5. 2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,420,000	11,330,000	3,910,000	
	3. 03. 3. 03. 01. 21. 10.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan (DAK REGULER)	52,597,000	52,597,000	-	
	3. 03. 3. 03. 01. 21. 10. 5. 2. 1. 01. 02.	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	-	480,000	480,000	
	3. 03. 3. 03. 01. 21. 10. 5. 2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	907,000	617,000	(290,000)	
	3. 03. 3. 03. 01. 21. 10. 5. 2. 2. 06. 02.	Belanja Penggandaan	900,000	555,000	(345,000)	
	3. 03. 3. 03. 01. 21. 10. 5. 2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31,690,000	50,945,000	19,255,000	
	3. 03. 3. 03. 01. 21. 10. 5. 2. 2. 15. 02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19,100,000	-	(19,100,000)	

RA-1

NAMA OPD	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PENJELASAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SE TELAH PERUBAHAN		
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	3. 05. 3. 05. 01. 01. 07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	13,000,000	-	(13,000,000)	
	3. 05. 3. 05. 01. 01. 07. 5.2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,000,000	-	(13,000,000)	
	3. 05. 3. 05. 01. 01. 20. 3. 05. 3. 05. 01. 01. 20. 5.2. 1. 01. 01.	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Tenaga Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28,000,000 28,000,000	-	(28,000,000) (28,000,000)	
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3. 07. 3. 06. 01. 16. 08.	Pembangunan dan Revitalisasi Sarana Industri(DAK)	1,125,000,000	1,125,000,000	-	
	3. 07. 3. 06. 01. 16. 08. 5.2. 2. 23. 01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	-	237,500,000	237,500,000	
	3. 07. 3. 06. 01. 16. 08. 5.2. 3. 49. 16.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik	1,125,000,000	887,500,000	(237,500,000)	
Sekretariat Daerah	4. 01. 4. 01. 03. 17. 02.	Penyusunan Standart Satuan Harga	446,820,000	470,550,000	23,730,000	
	4. 01. 4. 01. 03. 17. 02. 5.2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49,050,000	229,500,000	180,450,000	
	4. 01. 4. 01. 03. 17. 02. 5.2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1,105,000	6,135,000	5,030,000	
	4. 01. 4. 01. 03. 17. 02. 5.2. 2. 06. 01.	Belanja Cetak	111,750,000	136,770,000	25,020,000	
	4. 01. 4. 01. 03. 17. 02. 5.2. 2. 11. 05.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	-	15,510,000	15,510,000	
	4. 01. 4. 01. 03. 17. 02. 5.2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	173,425,000	7,200,000	(166,225,000)	
	4. 01. 4. 01. 03. 17. 02. 5.2. 2. 15. 02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35,890,000	53,835,000	17,945,000	
	4. 01. 4. 01. 03. 17. 02. 5.2. 2. 21. 02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	75,600,000	21,600,000	(54,000,000)	
	4. 01. 4. 01. 03. 48. 01.	Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah	333,055,000	-	(333,055,000)	
	4. 01. 4. 01. 03. 48. 01. 5.2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	123,600,000	-	(123,600,000)	
	4. 01. 4. 01. 03. 48. 01. 5.2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	700,000	-	(700,000)	
	4. 01. 4. 01. 03. 48. 01. 5.2. 2. 01. 04.	Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya	60,000	-	(60,000)	
	4. 01. 4. 01. 03. 48. 01. 5.2. 2. 06. 01.	Belanja Cetak	1,000,000	-	(1,000,000)	
	4. 01. 4. 01. 03. 48. 01. 5.2. 2. 11. 05.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,400,000	-	(5,400,000)	
4. 01. 4. 01. 03. 48. 01. 5.2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90,000,000	-	(90,000,000)		
4. 01. 4. 01. 03. 48. 01. 5.2. 2. 15. 02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	112,295,000	-	(112,295,000)		

BUPATI MALUKU TENGAH

TUANSIAL ABUA